

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN LOGISTIK DALAM RANGKA
PERBAIKAN KUALITAS LAYANAN MASYARAKAT KORBAN
BENCANA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

ABSTRAK

EKA SAFA AGUS MAULINDA, NPM. 16120235 “Implementasi Pengelolaan Logistik Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Layanan Masyarakat Korban Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan”. Bimbingan Bapak H. DELI ANHAR, sebagai Pembimbing Utama dan Ibu FIKA FIBRIYANITA, sebagai Co Pembimbing.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi bidang logistik dan bagaimana pengelolaan logistik BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat korban Bencana, serta untuk mengetahui hambatan yang dihadapi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pengelolaan logistik masyarakat korban bencana.

Metode penelitian menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. dengan jenis penelitian deskriptif, Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara terstruktur serta studi dokumen dan dokumentasi, kepada 3 orang informan. Teknik analisis data menggunakan hipotesis yang kemudian diuji dan dibuktikan dengan sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan koordinasi antara pendonor kepada para korban bencana yang tidak melalui atau sepengetahuan logistik, adanya hambatan aksesibilitas atau derajat kemudahan menuju lokasi bencana dan validitas informasi dari korban bencana yang terkena dampak kepada BPBD.

Kata Kunci : Implementasi, hambatan, logistik, korban bencana, bagian logistik BPBD Prov. Kalsel

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the implementation of logistics and how to manage the logistics at BPBD Provinsi Kalimantan Selatan in order to provide public services for disaster victims society, and also to find out the obstacles faced by the BPBD Provinsi Kalimantan Selatan in managing the logistics of disaster victims society.

The method used for this research is a qualitative research approachment, with descriptive type of research. The data were collected by observation methode,, structured interviews and study of documents and documentation, with 3 informants. The data analized technique using hypotheses which are then tested and proven with the research data sources. The results of the study showed that there was sn existence of coordination obstacles between the donors to disaster victims sociey who did not go through or without permission by BPBD Provinsi

Kalimantan Selatan logistical departement, barriers to accessibility or the degree of ease of access to the disaster location and the validity of information from affected disaster victims to the BPBD Provinsi Kalimantan Selatan logistics Departement.

Keywords : Implementation, obstacle, logistics, disaster victims society, BPBD Prov. Kalsel logistics departement

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejadian bencana merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan kerugian, mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat dan lingkungan yang disebabkan oleh fenomena ataupun gejala alam dengan ataupun tanpa campur tangan manusia. Bencana dalam skala tertentu dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda dan dampak psikologis bagi manusia khususnya para korban bencana. Bencana dapat terjadi kapan dan di mana saja, sehingga relatif tidak dapat diprediksi, maka dari itu diperlukan kesiapan sebagai bentuk antisipasi dalam menghadapi dan menanggulangi setiap kejadian bencana alam.

Kalimantan Selatan sebagaimana daerah-daerah lainnya di wilayah Indonesia, tidak lepas dari potensi terjadinya bencana. Berikut adalah data bencana banjir sebagai salah satu jenis bencana yang berpotensi terjadi pada setiap daerah di Provinsi Kalimantan Selatan sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Tabel Rekap Bencana Banjir Kalimantan Selatan Tahun 2019

No	Kabupaten / Kota	Frekuensi Kejadian	Terdampak		
			KK	Jiwa	Mengungsi
1	Barito Kuala	0	0	0	0
2	Banjarmasin	1	2	9	0
3	Banjarbaru	3	64	253	0
4	Banjar	0	0	0	0
5	Tapin	17	877	3295	0
6	Hulu Sungai Selatan	3	38	132	0
7	Hulu Sungai Tengah	1	2	7	0
8	Hulu Sungai Utara	0	0	0	0
9	Balangan	13	939	3777	0
10	Tabalong	5	110	293	5
11	Tanah Laut	2	253	839	0
12	Tanah Bumbu	19	6419	23284	97
13	Kotabaru	2	15	38	0
TOTAL		66	8719	31927	102

Peristiwa bencana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan keprihatinan dan menjadi perhatian setiap elemen bangsa, terlebih lagi bagi masyarakat di sekitar wilayah kejadian bencana. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, memicu rasa kemanusiaan untuk melakukan kegiatan bantuan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi pengelolaan logistik yang dilakukan bidang logistik BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Peraturan Kepala BNPB No. 13 Tahun 2008, serta mencari hambatan-hambatan bidang logistik BPBD Prov. Kalsel sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan atau memperbaiki kualitas layanan masyarakat korban bencana.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja peran bidang atau bagian logistik BPBD Provinsi Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana pengelolaan logistik BPBD Provinsi Kalimantan Selatan sebelum dan setelah terjadinya kejadian bencana dalam meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya terhadap masyarakat korban bencana?
3. Hambatan apakah yang dihadapi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengelolaan logistik bagi masyarakat korban bencana?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui peran bidang logistik BPBD Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Mengetahui bagaimana pengelolaan logistik BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat korban Bencana.
3. Mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam melakukan pengelolaan logistik masyarakat korban bencana

1.4 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan dan daerah atau lokasi kejadian bencana daerah setempat.

3. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang. Kegunaan informan bagi peneliti ialah membantu agar dalam waktu relatif singkat banyak informasi yang terjaring informan dimanfaatkan untuk berbicara bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lain

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

2. Wawancara terstruktur
3. Studi Dokumen dan Dokumentasi

II. ANALISIS HASIL PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian

Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga yang mengurus kebijakan penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi secara cepat dan efisien untuk provinsi Kalimantan Selatan. BPBD sebagai badan pemerintah daerah yang memiliki tugas bidang penanggulangan bencana daerah berfungsi sebagai penentu pedoman dan arahan jika terjadi bencana daerah, menentukan standar keselamatan dan penanggulangan bencana, merumuskan peta daerah rawan bencana di wilayah kerjanya, mengendalikan pengumpulan sumbangan dana dan bantuan lainnya jika ada bencana, merumuskan prosedur tetap penanganan bencana, hingga pelaporan dan evaluasi penanganan bencana. Jika terjadi bencana pada wilayah kerjanya, BPBD bekerjasama dengan SAR dan BNPB untuk penanggulangan, pertolongan, dan penyaluran bantuan kemanusiaan baik relawan, makanan, tenda, selimut dan lainnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Nomor 100). BPBD merupakan lembaga teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Selatan dan secara fungsional dibina oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

2.2 Data Penelitian

1. Hasil wawancara

a. Standart baku penanganan korban bencana (SOP)

Mengacu pada buku acuan PERKA BNPB yang menentukan bahwa standar untuk korban bencana itu apa yang diberikan, misalkan untuk balita ada peralatan atau seperangkat paket-paket, kemudian untuk orang dewasa juga ada paket-paketnya, dan untuk makanannya kita bekerjasama dengan SKPD lain seperti dinas sosial untuk menyediakan dapur umumnya dan lainnya seperti dinas kesehatan untuk kesehatan itu juga termasuk logistik, kemudian PMI juga menyediakan logistik, jadi BPBD Prov. Kalsel bekerjasama dengan dunia usaha masyarakat secara luas pemerintah.

b. Jaringan (*networking*) bidang logistik BPBD Prov. Kalsel dengan Sub bagian terkait logistik BPBD Prov. Kalsel

Network yang semuanya terlibat dalam bidang logistik, jadi pada saat kejadian bencana team yang pertama turun adalah team

evakuasi (pertolongan) setelah itu mereka di pengungsian semua masyarakat yang diungsikan disanalah mereka akan mendapatkan bantuan berbentuk logistik baik itu makanan, sandang, pangan dan kebutuhan hidup hariannya.

c. Upaya yang dilakukan BPBD Prov. Kalsel dalam menangani Sumber Daya Manusia

Melakukan pelatihan-pelatihan kepada para relawan dalam rangka penanganan korban bencana dilapangan, baik berbentuk pelatihan evakuasi, dapur umum, dan pengumpulan data-data di lapangan.

d. Permasalahan sebelum terjadi bencana

1) Tingkat kadaluarsa produk atau bahan makanan yang cepat rusak.

2) Adanya ketidak sesuaian dengan keinginan masyarakat dengan barang yang dikirim.

e. Permasalahan pasca bencana

1) Hambatannya antara pada kejadian itu data tidak akurat atau tidak lengkap.

2) Penerimaan data yang lambat.

3) Dalam penyaluran bantuan itu terkadang ada hambatan di lapangan lokasi yang rusak atau hancur.

4) Ada kendala masyarakat yang tidak mau mengungsi untuk menuju tempat pengungsian, karena sebagian dari mereka takut akan adanya kehilangan barang atau harta benda.

2.3 Hasil Penelitian

1. Peran Bidang Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Selatan

a. Telah melakukan penyusunan program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana.

b. Telah melakukan penyusunan program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana.

c. Telah melakukan penyusunan program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana.

d. Telah melakukan penyusunan program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan evakuasi masyarakat terkena bencana.

e. Telah melakukan penyusunan program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana.

f. Telah melakukan penyusunan program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan.

- g. Telah melakukan penyusunan program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik.

2. Pengelolaan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Sebelum dan Setelah Kejadian Bencana

a. Pengelolaan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Sebelum Kejadian Bencana

1. BPBD Prov. Kalsel melakukan upaya pelatihan terhadap para relawan dalam rangka penanganan korban bencana dilapangan, baik berbentuk pelatihan evakuasi, dapur umum, dan pengumpulan data-data di lapangan.
2. Melakukan penerimaan, pendataan, pengecekan logistik yang baru masuk
3. Melakukan kegiatan pengadaan, pengecekan jumlah (stock Opname) termasuk kelayakan produk logistik yang dikondisikan di gudang logistik yang terletak di belakang kantor BPBD Prov. Kalimantan Selatan.
4. Menempatkan logistik sesuai dengan standar penyimpanan yaitu, sesuai denah penempatan, aman dari pencurian, aman dari gangguan fisik, aman dari pencemaran kimiawi dan biologi, aman dari kebakaran dan ditata sesuai dengan standar pergudangan.
5. Menyiapkan logistik dalam bentuk paket untuk anak-anak dan keluarga korban bencana

b. Pengelolaan Logistik BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Setelah Kejadian Bencana

1. Pengadaan logistik dan peralatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
2. Pemulihan dan penerahan SDM, logistik dan pengadaan barang dan jasa penanggulangan bencana sesuai perintah Kepala Pelaksana
3. Membuat Laporan kegiatan dan Berita Acara Serah Terima Bantuan Logistik
4. Melakukan pendataan dan pengkoordinasian bantuan logistik dari masyarakat yang datang setelah kejadian bencana

3. Hambatan yang dihadapi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam Pengelolaan Logistik

a. Masalah Koordinasi

Terkendalanya koordinasi antara pendonor yang memberikan bantuan dan pemerintah yang menyalurkan bantuan. Sebagian pemberi bantuan, baik lembaga swadaya masyarakat atau perusahaan, langsung memberikan bantuannya ke lokasi bencana, tanpa koordinasi dengan pemerintah. Padahal, pemerintah adalah pihak berwenang yang memiliki data mengenai daerah yang sudah dan belum tersentuh logistik. Akibatnya,

terjadi penumpukan logistik di satu titik, sementara di titik pengungsian lainnya justru kekurangan.

Untuk itu, perlu dihimbau kepada para pendonor untuk tidak bergerak sendiri, serta berkoordinasi dengan pihak pemerintah dalam hal ini BPBD agar penyaluran bantuan dapat lebih merata. Jadi semua ada koordinasinya.

b. Masalah aksesabilitas (*Accesability*)

Aksesibilitas (atau keteraksesan, ketercapaian) adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang, terhadap suatu objek, pelayanan ataupun lingkungan. Dalam pengertian yang lain bahwa aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Berdasarkan informasi dari informan ada terdapat sejumlah lokasi atau daerah tertentu sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor sehingga datangnya bantuan menjadi terlambat.

c. Informasi dan komunikasi

Masalah yang ketiga, adalah validitas informasi dari korban bencana yang terkena dampak kepada BPBD. BPBD kurang atau tidak memperoleh informasi yang valid atau jelas mengenai daerah terdampak yang belum tersentuh bantuan. Di sisi lain, masyarakat setempat tidak tahu kemana memberikan informasi terkait bencana terdampak, sehingga informasi tersebut tidak sampai kepada pihak yang tepat, padahal informasi itulah yang diperlukan untuk dikembangkan oleh pihak BPBD sehingga memperoleh data bantuan logistik yang perlu disalurkan.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

1. Masalah Koordinasi antara pendonor (yang memeberikan bantuan logistik) dengan pihak logistik BPBD, hal ini diperlukan agar penyaluran bantuan dapat lebih merata, efektif dan efisien.
2. Masalah aksesabilitas (*Accesability*) menuju ke lokasi bencana tertentu yang sulit dijangkau oleh kendaraan bermotor, ataupun lokasi dengan kondisi jalan yang rusak sehingga tidak mudah bahkan tidak dapat dilewati jelas merupakan masalah besar, karena masyarakat korban bencana memerlukan bantuan darurat.
3. Informasi dan komunikasi yang cepat dan valid atau jelas mengenai segala sesuatu yang terkait dengan peristiwa bencana di lokasi kejadian menentukan tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh pihak terkait dalam hal ini BPBD. Dalam konteks ini percepatan informasi merupakan hal yang vital, dan menuntut koordinasi yang solid antara BPBD kabupaten/Kota dengan BPBD Provinsi.

3.2 Saran

1. Kepada instansi BPBD Provinsi, Kabupaten/Kota untuk lebih intens melakukan kegiatan penyuluhan bukan saja kepada

- masyarakat Desa tangguh bencana tetapi juga masyarakat umum yang akan terlibat sebagai relawan dari segala segmen terutama bagi pelajar dan mahasiswa, karena bencana dapat terjadi di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait akses jalan yang rusak sehingga meminimalisir hambatan yang dihadapi pada saat terjadi peristiwa bencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito A & Setiawan J, 2018. Metode Penelitian Kualitatif. CV. Jejak, Jawa Barat
- Arlianto JA, 2018. Artikel Logistik Kemanusiaan (Humanitarian Logistics), Universitas Surabaya, Surabaya, 1-2
- Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPB) Provinsi Kalimantan.
- Kemendagri RI 2018. Pembentukan Daerah-Daerah Di Indonesia Sampai Dengan Tahun 2014, Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Jakarta.
- Manzilati A, 2017. Metodologi penelitian kualitatif : Paradigma, Metode dan aplikasi, UB Press, Malang
- Perpres RI Nomor 17 Tahun 2018. Tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34, Jakarta.